BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Umum Mengenai Desa

Menurut Sutoro Eko, desa pada umumnya mempunyai pemerintahan sendiri yang dikelola secara otonom tanpa ikatan hirarkis-struktural dengan struktur yang lebih tinggi.¹ Namun menurut Geertz, desa berasal dari bahasa Sanskrit yang berarti daerah pinggiran, tempat, daerah yang bergantung pada kekuasaan yang lebih tinggi atau daerah yang diperintah oleh suatu kekuasaan di luar desa.²

Sejatinya desa adalah negara kecil, atau apa yang dimaksud Ter Haar sebagai *doorps republiek* karena sebagai masyarakat hukum desa memiliki semua perangkat suatu negara teritori, warga, aturan atau hukum (rules atau laws), dan pemerintahan.³ Dari kacamata pemerintahan nasional, pemerintah desa dipandang sebagai unit pemerintahan terendah yang menempati sebagian dari wilayah negara. Dalam konteks ini, pemerintahan nasional adalah jalinan antar sistem-sistem pemerintahan desa dan berbagai struktur pemerintahan lain di atasnya. Dengan kata lain, pemerintah desa hanya berperan sebagai subsistem yang mati hidupnya tergantung pada kemauan supra-sistem di atasnya, yaitu pemerintah nasional

¹ Sutoro Eko, "Masa Lalu,, Loc.Cit.

² Lihat dalam Suryanef dan Al Rafni, "Kembali ke Nagari, Kembali ke Identitas dan Generasi Lokal?", dalam Jamil Gunawan dkk (Editors), *Desentralisasi, Globalisasi, dan Demokrasi Lokal*, LP3ES, Jakarta, 2005, Hlm. 353

³ Lihat dalam R Yando Zakaria, "Pemulihan Kehidupan Desa dan UU No. 22 Tahun 1999", dalam Jamil Gunawan dkk. (Editors), *Desentralisasi.....*, Op.Cit., Hlm. 332.

(negara) yang secara berlapis mengukungnya sejak dari pemerintah Kecamatan, Kabupaten, Provinsi sampai Pemerintah Pusat.⁴

Lebih lanjut Soetardjo menyatakan, perkataan *desa* hanya dipakai di Jawa, Madura, dan Bali. Perkataan *dusun* dipakai di Sumatera Selatan; di Maluku orang mengenal nama *dusun-dati*. Di Batak perkataan *dusun* dipakai buat nama pendukuhan. Di Aceh orang memakai nama *gampong* dan *meunasah* buat daerah hukum yang paling bawah. Di Batak, daerah hukum setingkat dengan desa diberi nama *kuta*, *uta* atau *huta*. Pendudukannya dinamakan dusun *sosor* (ingatlah perkataan selosor di Jawa) dan *pagaran*. Pendukuhan lain yang merupakan masyarakat pertanian, dinamakan *banjar* atau *jamban*. Di Simelungun, daerah desa sebagai daerah hukum telah terdesak mati. Di atas daerah-daerah itu dibentuk daerah gabungan yang dinamakan perbapan, induk *ni huta*. Bagiannya dinamakan anak *ni huta* atau *sosor*. Di Batak Utara daerah gabungan tadi dinamakan *hundulan*, akan tetapi hanya bersifat daerah pemerintahan, bukan suatu daerah hukum. Di Batak Selatan daerah hukum yang paling bawah bukanlah daerah yang setingkat dengan desa, melainkan sekumpulan *kampong* atau tempat kediaman penduduk yang dinamakan kuria, dulu juga diberi nama *janjian*.⁵

Daerah hukum di Minangkabau diberi nama *nagari*, daerah gabungan ada yang dinamakan *luha'*. Di Sumatera Timur daerah hukum yang paling bawah ialah *suku*. Di Sumatera Selatan (Korintji, Palembang, Bengkulu) nama daerah hukum ialah *dusun* dan daerah gabungan dinamakan *mendapo* atau *marga*. Nama *marga* atau *merga* di Batak dipakai buat suatu masyarakat seturunan, di daerah Alas namanya *margo*. Daerah hukum di

⁴ Maschuri Mashab, *Politik...*, *op.Cit.*, Hlm. 4

⁵ Sutoro Eko, "**Masa Lalu, Masa Kini, dan Masa Depan Otonomi Desa**", dalam Soetandyo Wignosubroto dkk (Tim Penulis), *Pasang Surut Otonomi Daerah, Sketsa Perjalanan 100 Tahun*, Institute for Local Development dan Yayasan Tifa, Jakarta, 2005, Hlm 444.

Lampung namanya *dusun* atau *tiuh*, di Minahasa *wanua*, di daerah Makasar ialah daerah *gaukang*, di daerah Bugis adalah daerah *matowa*. Di Tanah Toraja daerah-daerah hukum disebut dengan namanya sendiri-sendiri. Di Maluku daerah hukum yang paling bawah disebut *negory*, atau pun *dati*.⁶

B. Kajian Umum Mengenai Pemerintahan Desa

Pemerintahan desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan pemerintah desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsure penyelenggara pemerintahan desa.⁷ Penjelasan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menyatakan bahwa pengaturan desa berasaskan :

1. Rekognisi, yaitu pengakuan terhadap hak asal usul;
2. Subsidiaritas, yaitu penetapan kewenangan berskala local dan pengambilan keputusan secara local untuk kepentingan masyarakat desa;
3. Keberagaman, yaitu pengakuan dan penghormatan terhadap sistem nilai yang berlaku di masyarakat desa, tetapi dengan tetap mengindahkan sistem nilai bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara;
4. Kebersamaan, yaitu semangat untuk berperan aktif dan bekerja sama dengan prinsip saling menghargai antara kelembagaan di tingkat desa dan unsur masyarakat desa dalam membangun desa;
5. Kegotongroyongan, yaitu kebiasaan saling tolong menolong untuk membangun desa;

⁶ *Ibid* .

⁷ Pasal 1 angka 2 dan 3 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Desa

6. Kekeluargaan, yaitu kebiasaan warga masyarakat desa sebagai bagian dari satu kesatuan keluarga besar masyarakat desa;
7. Musyawarah, yaitu proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat desa melalui diskusi dengan berbagai pihak yang berkepentingan;
8. Demokrasi, yaitu sistem pengorganisasian masyarakat desa dalam suatu sistem pemerintahan yang dilakukan oleh masyarakat desa atau dengan persetujuan masyarakat desa serta keluhuran harkat dan martabat manusia sebagai makhluk hidup Tuhan Yang Maha Esa diakui, ditata, dan dijamin;
9. Kemandirian, yaitu suatu proses yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dan masyarakat desa untuk melakukan suatu kegiatan dalam rangka memenuhi kebutuhannya dengan kemampuan sendiri;
10. Partisipasi, yaitu turut berperan aktif dalam suatu kegiatan;
11. Kesetaraan, yaitu kesamaan dalam kedudukan dan peran;
12. Pemberdayaan, yaitu upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat desa;
13. Keberlanjutan, yaitu suatu proses yang dilakukan secara terkoordinasi, terintegrasi, dan berkesinambungan dalam merencanakan dan melaksanakan program pembangunan desa.⁸

C. Otonomi Desa

Secara etimologi (harfiah), otonomi daerah berasal dari 2 kata yaitu "otonom" dan "daerah". Kata otonom dalam bahasa Yunani berasal dari kata "*autos*" yang berarti sendiri dan "*nomos*" yang berarti aturan. Sehingga otonom dapat diartikan sebagai mengatur sendiri

⁸ Pasal 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

atau memerintah sendiri. Sedangkan daerah yaitu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah. Jadi, otonomi daerah dapat diartikan sebagai kewenangan untuk mengatur sendiri kepentingan suatu masyarakat atau kewenangan untuk membuat aturan guna mengurus daerahnya sendiri.

Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia menjadi titik fokus penting dalam memperbaiki kesejahteraan rakyat. Pengembangan suatu daerah bisa disesuaikan oleh pemerintah daerah dengan potensi dan ciri khas daerah masing-masing. Hal ini merupakan kesempatan yang sangat baik bagi pemerintah daerah untuk membuktikan bahwa kemampuannya dalam mengatur serta melaksanakan kewenangan yang menjadi hak daerah masing-masing. Berkembang atau tidaknya suatu daerah tergantung dari kemampuan dan kemauan untuk dapat melaksanakannya. Pemerintah daerah bisa bebas berekspresi dan berkreasi dalam rangka membangun daerahnya sendiri, tentu saja harus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Secara konseptual, tujuan otonomi daerah di Indonesia dilandasi oleh tiga tujuan utama yaitu tujuan politik, tujuan administratif dan tujuan ekonomi.

1. Tujuan politik dalam pelaksanaan otonomi daerah yaitu upaya untuk mewujudkan demokratisasi politik melalui partai politik dan DPRD.
2. Tujuan administratif dalam pelaksanaan otonomi daerah yaitu adanya pembagian urusan pemerintahan antara pusat dengan daerah, termasuk pembaharuan manajemen birokrasi pemerintahan di daerah, serta sumber keuangan.

3. Tujuan ekonomi dalam pelaksanaan otonomi daerah yaitu terwujudnya peningkatan indeks pembangunan manusia sebagai sarana peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Menurut Widjaja, menyatakan bahwa otonomi desa merupakan otonomi asli, bulat dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah.⁹ Sebaliknya pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa tersebut.

Berkaitan dengan otonomi asli menurut Fakrulloh dan kawan-kawan bahwa dalam memaknai otonomi asli terdapat dua aliran pemikiran yaitu:

1. Aliran pemikiran pertama memaknai kata otonomi asli sebagai adat atau dekat dengan sosial budaya;
2. Aliran pemikiran kedua yang memaknai bahwa otonomi desa sebagai otonomi masyarakat sehingga lebih tepat disebut otonomi masyarakat desa.¹⁰

Juliantara menerangkan bahwa otonomi desa bukanlah sebuah kedaulatan melainkan pengakuan adanya hak untuk mengatur urusan rumah tangganya sendiri dengan dasar prakarsa dari masyarakat. Otonomi dengan sendirinya dapat menutup pintu intervensi institusi di atasnya, sebaliknya tidak dibenarkan proses intervensi yang serba paksa, mendadak, dan tidak melihat realitas komunitas.¹¹

Otonomi desa merupakan hak, wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul dan nilai-nilai sosial budaya yang ada pada masyarakat untuk tumbuh dan berkembang

⁹ Prof. Drs. Widjaja, HAW, 2003, **Pemerintah Desa/Marga**, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hlm.165.

¹⁰ Fakhrollah, Zudan, dkk. 2004. **Kebijakan Desentralisasi di Persimpangan**, Jakarta, CV. Cipruy, hlm. 7

¹¹ Juliantara, Dadang. 2003. **Pembaharuan Desa, Bertumpu Pada Angka Terbawah**, Yogyakarta, Lappera Pustaka Utama, hlm. 116.

mengikuti perkembangan desa tersebut. Urusan pemerintahan berdasarkan asal-usul desa, urusan yang menjadi wewenang pemerintahan Kabupaten atau Kota diserahkan pengaturannya kepada desa, namun dalam pelaksanaan hak, kewenangan dan kebebasan dalam penyelenggaraan otonomi desa harus tetap menjunjung nilai-nilai tanggung jawab terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan mengungkapkan bahwa desa adalah bagian yang tidak terpisahkan dari bangsa dan negara Indonesia.¹²

Bagi desa, otonomi yang dimiliki berbeda dengan otonomi yang dimiliki oleh daerah provinsi maupun daerah Kabupaten dan daerah Kota. Otonomi yang dimiliki oleh desa adalah berdasarkan asal-usul dan adat-istiadatnya, bukan berdasarkan penyerahan wewenang dari Pemerintah. Menurut Taliziduhu pengakuan otonomi di desa menjelaskan sebagai berikut:

1. Otonomi desa diklasifikasikan, diakui, dipenuhi, dipercaya, dan dilindungi oleh pemerintah, sehingga ketergantungan masyarakat desa kepada “kemurahan hati” pemerintah dapat semakin berkurang;
2. Posisi dan peran pemerintahan desa dipulihkan, dikembalikan seperti semula atau dikembangkan sehingga mampu mengantisipasi masa depan.¹³

Tujuan otonomi desa adalah sebagai berikut :

1. Memperkuat kemandirian desa berbasis kemandirian NKRI;
2. Memperkuat posisi desa sebagai subyek pembangunan;
3. Mendekatkan perencanaan pembangunan ke masyarakat;
4. Memperbaiki pelayanan publik dan pemerataan pembangunan;

¹² Prof. Drs. Widjaja, HAW, 2003, **Pemerintah Desa/Marga**, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hlm.166.

¹³ Ndraha, Taliziduhu. 1997, **Peranan Administrasi Pemerintahan Desa Dalam Pembangunan Desa**, Yayasan Karya Dharma IIP, Jakarta, Hlm. 12.

5. Menciptakan efisiensi pembiayaan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan lokal;
6. Menggairahkan ekonomi local dan penghidupan masyarakat desa;
7. Memberikan kepercayaan, tanggung jawab, dan tantangan bagi desa untuk membangkitkan prakarsa dan potensi desa;
8. Menempa kapasitas desa dalam mengelolah pemerintahan dan pembangunan;
9. Membuka arena pembelajaran yang sangat berharga bagi masyarakat Desa, lembaga- lembaga Desa dan masyarakat;
10. Merangsang tumbuhnya partisipasi masyarakat lokal.

D. Kewenangan Desa

Penjelasan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan kewenangan desa meliputi :

“Kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan adat istiadat Desa”.¹⁴

Penyelenggaraan kewenangan desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa didanai oleh APB Desa. Penyelenggaraan kewenangan lokal berskala desa selain didanai oleh APB Desa juga dapat didanai oleh APBN dan APBD. Penyelenggaraan kewenangan desa yang ditugaskan oleh Pemerintah didanai oleh APBN yang dialokasikan pada bagian anggaran kementrian lembaga dan disalurkan melalui satuan kerja perangkat

¹⁴ Pasal 18 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

daerah kabupaten/kota. Penyelenggaraan kewenangan desa yang ditugaskan oleh pemerintah daerah didanai oleh APBD.¹⁵

E. Kajian Umum Mengenai Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Adapun persyaratan calon anggota Badan Permusyawaratan Desa menurut ketentuan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 adalah:

1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan NKRI dan Bhineka Tunggal Ika;
3. Berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah pernah menikah;
4. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
5. Bukan sebagai perangkat pemerintah desa;
6. Bersedia dicalonkan menjadi anggota Badan Permusyawaratan Desa;
7. Wakil penduduk desa yang dipilih secara demokratis.

Badan Permusyawaratan Desa berhak :

1. Mengawasi dan meminta keterangan penyelenggaraan pemerintahan : kepada pemerintah desa;

¹⁵ Pasal 90 Peraturan Pemerintah Nomor.43 Tahun 2014 tentang Desa

2. Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasayarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa;
3. Mendapat biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.¹⁶

Badan Permusyawaratan Desa wajib :

1. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
2. Melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
3. Menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat Desa;
4. Mendahulukan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi, kelompok, dan/atau golongan;
5. Menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat Desa; dan
6. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.¹⁷

Dalam hal ini pengawasan dapat diklasifikasikan berdasarkan berbagai hal. Menurut subyek yang melakukan pengawasan dibagi menjadi 4 macam antara lain:

1. Pengawasan melekat (Waskat) yaitu pengawasan yang dilakukan oleh setiap pimpinan terhadap bawahan dan satuan kerja yang dipimpinnya;

¹⁶ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

¹⁷ Pasal 63 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

2. Pengawasan fungsional (Wasnal) yaitu pengawasan yang dilakuakn oleh aparat yang tugas pokoknya melakukan pengawasan seperti BPK.
3. Pengawasan legislative (Wasleg) yaitu pengawasan yang dilakukan oleh lembaga perwakilan rakyat baik dipusat (DPR) maupun di daerah (DPRD). Pengawasan jenis ini merupakan pengawasan politik.
4. Pengawasan masyarakat (Wasmas) ialah pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat seperti yang dilakukan oleh LSM atau yang termuat dalam media massa.

Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi :

1. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
2. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
3. Terdaftar sebagai penduduk Desa dan bertempat tinggal di Desa paling kurang 1 (satu) tahun;
4. Syarat lain yang ditentukan dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.¹⁸

Struktur pembentukan Badan Permusyawaratan Desa sebagai berikut

1. Ketua;
2. Sekretaris;
3. Bendahara; dan
4. Anggota.¹⁹

Jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dengan jumlah gasal, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang, dengan memperhatikan wilayah, perempuan, penduduk, dan kemampuan Keuangan Desa. Anggota Badan

¹⁸ Pasal 55 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

¹⁹ Pasal 2 Peraturan Bupati Jombang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Badan Permusyawaratan Desa

Permasyarakatan Desa sebelum memangku jabatannya bersumpah/berjanji secara bersama-sama dihadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk.²⁰

Hal penting menurut Penulis yang perlu diperhatikan yaitu mengenai fungsi Badan Permasyarakatan Desa (BPD) dalam pengesahan dan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Karena didalam Pasal 73 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa hanya dimusyawarahkan antara Kepala Desa dan Badan Permasyarakatan Desa. Seharusnya tidak cukup dimusyawarahkan, tetapi ditambahkan dengan persetujuan oleh Badan Permasyarakatan Desa.

Selain itu juga pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa belum mengatur mekanisme pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa oleh Kepala Desa. Seharusnya Kepala Desa memberikan laporan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada Badan Permasyarakatan Desa. Laporan pertanggungjawaban tersebut sebagai upaya untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan desa yang transparan dan demokratis terhadap masyarakat.

F. Kajian Umum Mengenai Kepala Desa

Kepala Desa adalah kepala Pemerintahan Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan

²⁰ Pasal 58 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

masyarakat desa. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berkewajiban :

1. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara ke hal ini kepala dutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
3. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa;
4. Menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
5. Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
1. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, professional, efektif, dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme.
2. Menjalani kerja sama dan koordinasi seluruh pemangku kepentingan di Desa;
8. Menjalankan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
9. Mengelola Keuangan dan Aset Desa;
10. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;
11. Menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa
12. Mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;
13. Membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
14. Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasayarakatan di Desa;
15. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
16. Memberikan informasi kepada masyarakat Desa.²¹

²¹ Pasal 26 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Selain menjalankan kewajiban diatas, Kepala Desa juga wajib memberikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati/Walikota, menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati/Walikota, memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran, dan memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat Desa setiap akhir tahun anggaran melalui selebaran yang ditempelkan pada papan pengumuman atau diinformasikan secara lisan dalam berbagai pertemuan masyarakat desa, radio dan lain-lain.²²

Kepala Desa juga dituntut memiliki kemampuan menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa setiap tahunnya untuk diajukan kepada Badan Permusyawaratan Desa. Setelah dimusyawarahkan dengan Badan Permusyawaratan Desa, Kepala Desa membuat Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Selain itu, Kepala Desa selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa juga harus memiliki kemampuan mekanisme pengadaan barang dan jasa milik Pemerintah terhadap kegiatan pembangunan yang dananya bersumber dari anggaran negara (APBN/APBD).

Apabila Kepala Desa tidak menjalankan kewajiban dengan sebaik-baiknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4) dan Pasal 27 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis. Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.²³

²² Pasal 27 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

²³ Pasal 28 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Masyarakat Desa yang menjadi anggota Badan Permusyawaratan Desa juga memiliki peran aktif dalam hal ini yaitu dituntut untuk memiliki kemampuan memeriksa Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang diajukan oleh Kepala Desa serta melakukan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan desa dan pelaksanaan program pembangunan desa oleh Kepala Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa belum mengatur sistem mekanisme pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa seperti halnya pada pengelolaan keuangan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota yaitu pengajuan, pembahasan, pengesahan, pelaksanaan, pengawasan serta pertanggungjawaban